

---

***Dynamic Governance: Mengoptimalkan Kebijakan Subsidi Angkutan Umum dengan Tarif Berbasis Jarak (Studi Kasus: LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero))***

**Dewi Wahyu Koconingrahayu<sup>1</sup>, Atik Aprianingsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Email : [dewi\\_koconingrahayu@sbm-itb.ac.id](mailto:dewi_koconingrahayu@sbm-itb.ac.id), [atik.apri@sbm-itb.ac.id](mailto:atik.apri@sbm-itb.ac.id)

---

**Abstrak**

Transportasi umum merupakan kunci dalam mendukung konektivitas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu inisiatif utama adalah proyek LRT Jabodebek yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan solusi transportasi yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tarif berbasis jarak terhadap preferensi pengguna LRT Jabodebek serta mengevaluasi efektivitas subsidi pemerintah. Metode penelitian meliputi analisis kuantitatif menggunakan uji paired t-test dan pendekatan kepustakaan dari berbagai dokumen kebijakan serta data terkait. Hasil penelitian menunjukkan sistem tarif berbasis jarak meningkatkan minat penumpang sebesar 16,73% dibandingkan tarif tetap, dengan perbedaan signifikan secara statistik ( $p < 0,05$ ). Sistem ini dinilai lebih adil dan sesuai dengan jarak perjalanan pengguna. Namun, tantangan terkait keterjangkauan tarif bagi masyarakat berpendapatan rendah membutuhkan kebijakan subsidi yang optimal. *Dynamic Governance* diidentifikasi sebagai pendekatan yang relevan untuk mengadaptasi kebijakan tarif dan subsidi terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi. Kesimpulannya, penerapan tarif berbasis jarak yang diimbangi subsidi tepat sasaran dapat meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas transportasi. Implikasi penelitian ini mendorong pemerintah dan operator untuk mengadopsi tata kelola dinamis guna menjamin keberlanjutan layanan transportasi publik yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci:** LRT Jabodebek, PSO, tata kelola dinamis

**Abstract**

*Public transportation is the key to supporting connectivity to realize the vision of Golden Indonesia 2045. One of the main initiatives is the Jabodebek LRT project which aims to reduce congestion and provide environmentally friendly transportation solutions. This study aims to analyze the influence of distance-based tariffs on the preferences of Jabodebek LRT users and evaluate the effectiveness of government subsidies. The research methods include quantitative analysis using paired t-test and literature approaches from various policy documents and related data. The results showed that the distance-based fare system increased passenger interest by 16.73% compared to fixed fares, with a statistically significant difference ( $p < 0.05$ ). This system is considered fairer and in accordance with the user's travel distance. However, challenges related to the affordability of tariffs for low-income people require optimal subsidy policies. Dynamic Governance is identified as a relevant approach to adapting tariff and subsidy policies to changing socio-economic conditions. In conclusion, the implementation of distance-based tariffs offset by targeted subsidies can improve operational efficiency and transportation accessibility. The implications of this research encourage governments and operators to adopt Dynamic Governance to ensure the sustainability of fair and inclusive public transportation services for all levels of society.*

**Keywords:** LRT Jabodebek, PSO, dynamic governance

---

## PENDAHULUAN

Transportasi umum memegang peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam menciptakan konektivitas yang efektif di berbagai moda transportasi, seperti darat, laut, udara, dan perkeretaapian (Purwantoro, 2023). Infrastruktur transportasi berfungsi sebagai tolok ukur dalam mendukung perkembangan wilayah, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Aromatica et al., 2024; Djadjuli, 2018; Ida Restari, 2022; Susanti & Sabardila, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Perhubungan RI (2021), yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mencapai tujuan tersebut (Widodo, 2018).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memainkan peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur konektivitas yang dapat meningkatkan produktivitas (Anggita et al., 2022; Rahayu, 2020). Infrastruktur yang dibangun oleh KAI diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga pada skala ekonomi yang lebih besar dan optimal, yang menunjukkan bahwa ada perbaikan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada (Huang et al., 2016; Suprpto, 2021).

Salah satu tujuan utama pembangunan infrastruktur transportasi ini adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, yang sering kali menjadi penghambat utama mobilitas perkotaan, terutama di wilayah Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi). Dengan adanya sistem transportasi massal yang lebih baik, diharapkan kemacetan dapat diminimalkan, sehingga mobilitas perkotaan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Sistem transportasi ini akan mendorong urbanisasi yang lebih terkelola dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan memfasilitasi perpindahan orang dari satu area ke area lainnya dengan lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan.

Proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, yang beroperasi sejak 28 Agustus 2023, memang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan konektivitas dan mobilitas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) (Batarce & Galilea, 2018; Sianipar, 2019). Dengan lebih dari 15,2 juta penumpang yang diangkut hingga saat ini, LRT Jabodebek menunjukkan potensi besar dalam mengurangi kemacetan serta menyediakan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh proyek ini, terutama dalam tahap pengoperasian, adalah bagaimana menjaga keterjangkauan dan aksesibilitas layanan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama dengan mempertimbangkan biaya operasional yang tinggi (Anciaes et al., 2019).

Salah satu aspek utama dari layanan LRT Jabodebek adalah penerapan sistem tarif berbasis jarak, di mana tarif yang dikenakan kepada penumpang dihitung berdasarkan seberapa jauh perjalanan yang dilakukan (Q. Wang & Deng, 2019). Meskipun sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kenyataannya penentuan tarif bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang bervariasi.

Di Indonesia, khususnya di Jakarta, terdapat kesenjangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi (Jakarta, 2019). Dengan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pekerjaan, banyak penduduk dari daerah atau pinggiran yang mengandalkan transportasi umum untuk mencari nafkah di pusat kota. Dalam hal ini, tarif yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah, menghalangi mereka untuk menggunakan LRT Jabodebek sebagai sarana transportasi yang lebih efisien (Gemilar, 2019).

Selain itu, pengaturan tarif juga berhubungan erat dengan prinsip keadilan sosial. Sebagai sarana transportasi publik, LRT Jabodebek seharusnya memberikan akses yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengurangi kualitas layanan. Jika tarif terlalu tinggi, masyarakat dengan penghasilan rendah atau menengah mungkin akan kesulitan untuk mengakses transportasi yang seharusnya dapat mereka manfaatkan untuk mencapai tempat kerja, pendidikan, atau kebutuhan lainnya (S. Wang & Qu, 2017).

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada masyarakat agar tarif LRT Jabodebek terjangkau maka Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk PSO (Public Service Obligation) (Perhubungan, 2018). PSO mengharuskan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi penyedia layanan transportasi umum agar tarif tetap terjangkau oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Sistem tarif berbasis jarak yang digunakan dalam LRT Jabodebek mungkin perlu diimbangi dengan kebijakan subsidi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan finansial penyelenggaraan layanan, sekaligus memastikan keadilan dalam akses transportasi bagi Masyarakat (Rubensson et al., 2020).

Tata kelola yang dinamis memainkan peran penting dalam penyesuaian dan optimalisasi tarif untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan dapat mengatasi perbedaan daya beli antara kelompok masyarakat yang berbeda (Banerjee et al., 2020). Dengan pendekatan tata kelola yang responsif, pemerintah dan PT KAI dapat terus menyesuaikan tarif berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan tingkat daya beli masyarakat yang terus berkembang. Studi sebelumnya telah menunjukkan perlunya struktur tarif kereta api yang lebih kompleks dapat memberikan manfaat potensial bagi pelanggan, sejauh menawarkan peluang yang lebih besar untuk menemukan yang kombinasi biaya disukai, durasi waktu, kenyamanan, dan tingkat fleksibilitas (Anciaes et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini meyakini bahwa untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, penting bagi pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengadopsi pendekatan tata kelola yang dinamis dalam menerapkan cara mengoptimalkan kebijakan subsidi angkutan umum (LRT Jabodebek) dengan tarif berbasis jarak (Song et al., 2019).

Penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan subsidi transportasi umum dengan tarif berbasis jarak dalam proyek LRT Jabodebek. Variabel utama yang dianalisis meliputi dampak sistem tarif terhadap preferensi masyarakat, keadilan akses layanan, dan keberlanjutan finansial operator. Selain itu, pendekatan tata kelola yang dinamis (dynamic governance) akan dievaluasi untuk mengidentifikasi strategi optimal dalam mengatasi tantangan yang ada

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam mengintegrasikan prinsip *Dynamic Governance* dengan sistem tarif berbasis jarak. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya berfokus pada dampak subsidi atau struktur tarif secara individual,

penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kombinasi kedua aspek tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan layanan transportasi publik di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan tarif berbasis jarak terhadap preferensi pengguna LRT Jabodebek, mengevaluasi efektivitas subsidi dalam menjaga keterjangkauan tarif, serta mengusulkan pendekatan tata kelola yang dinamis untuk meningkatkan keberlanjutan layanan transportasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut memberikan wawasan baru bagi pemerintah dan operator transportasi dalam mengelola subsidi dan tarif secara efisien, mendukung pengembangan kebijakan transportasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pemahaman akademis mengenai penerapan *Dynamic Governance* dalam konteks transportasi publik di Indonesia dan memberikan solusi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan transportasi publik yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks LRT Jabodebek

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis kebijakan-kebijakan mengatasi permasalahan transportasi di Jabodebek adalah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel tertentu yang relevan dengan topik penelitian, memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat diuji secara statistik dan penelitian kepustakaan digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi kebijakan pemerintah, publikasi perusahaan, makalah, jurnal, dan sumber lainnya, termasuk media online (Dutta & Mandal, 2018).

Sumber data utama berasal dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara kepada pengguna transportasi umum serta data sekunder berupa laporan kebijakan, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis statistik, seperti uji regresi atau uji-t untuk mengukur signifikansi hubungan antar variabel. Teknik pengumpulan data melibatkan penyebaran kuesioner terstruktur kepada sampel yang representatif serta wawancara semi-terstruktur untuk mendalami pemahaman responden terkait tarif dan pelayanan. Metode ini bertujuan untuk memberikan hasil yang objektif dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyesuaian terhadap Tarif

Penyesuaian tarif berbasis jarak yang efektif dapat mengubah perilaku transportasi masyarakat, terutama jika tarifnya lebih terjangkau dan adil. Pengoptimalan tarif yang mengarah pada penurunan tarif di stasiun tertentu yang selama ini kurang diminati, dan penyesuaian harga pada waktu - waktu tertentu dapat mengundang lebih banyak penumpang untuk beralih dari moda transportasi pribadi ke LRT Jabodebek. Dengan

meningkatnya minat masyarakat, jumlah penumpang akan bertambah, yang pada akhirnya memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik bagi operator, serta penghematan subsidi dari pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tarif berdasarkan jarak terhadap volume penumpang LRT Jabodebek dengan melihat beberapa aspek yang berbeda. Dalam hal ini, aspek-aspek yang dianalisis mencakup pengaruh tarif terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodebek, serta mempertimbangkan faktor pelayanan sebagai variabel tambahan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana kedua factor (tarif dan pelayanan) bekerja secara bersama-sama dalam memengaruhi keputusan konsumen. Misalnya, meskipun tarif berdasarkan jarak lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik (misalnya waktu perjalanan yang lebih cepat, kenyamanan, atau fasilitas) mungkin bisa mendorong lebih banyak penumpang untuk tetap menggunakan LRT.

Berdasarkan hasil uji paired t-test, terdapat perbedaan antara tarif tetap (Singlefare) dan tarif berdasarkan jarak (Distancefare) menunjukkan perubahan minat responden sebesar 16,73% dengan nilai p-value sangat kecil (0,0000), yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan secara statistic. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan dalam preferensi penumpang antara tarif tetap dan tarif berdasarkan jarak. Responden lebih cenderung memilih tarif berdasarkan jarak dibandingkan dengan tarif tetap. Perubahan minat sebesar 16,73% menunjukkan bahwa sistem tarif berdasarkan jarak lebih menarik bagi penumpang, mungkin karena dianggap lebih adil atau sesuai dengan jarak perjalanan yang mereka tempuh.

### ***Dynamic Governance dalam Penentuan Tarif***

Menurut Neo dan Chen (2007:52) merumuskan *Dynamic Governance* sebagai “to how these chosen paths, policies, institutions and structures adapt to an uncertain and fast changing environment so that they remain relevant and effective in achieving the long – term desired outcomes of a society”, sehingga *Dynamic Governance* merupakan pendekatan yang menekankan kemampuan organisasi, termasuk pemerintahan dan perusahaan, untuk beradaptasi dengan memperhatikan elemen culture dan capabilities (think ahead, think again, think across) disertai faktor pendorong di dalam diri sumber daya manusia seperti able people dan agile processes (Huraerah, 2022). Faktor eksternal juga menjadi pengaruh untuk sukses tidaknya program yang dibentuk. Perhatian yang dapat ditekankan pada pemikiran *Dynamic Governance* yaitu pemerintah seharusnya dapat memikirkan tindakan jangka panjang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dinamis. Perubahan dunia yang sangat cepat dapat membuat ketidakpastian terkait kondisi di masa kini ataupun di masa mendatang (Socorro & Betancor, 2020).

Berdasarkan hasil uji Paired t-test yang menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap tarif berbasis jarak dibandingkan dengan tarif tetap, sehingga LRT Jabodebek dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan atau mengembangkan sistem tarif berbasis jarak untuk lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi penumpang dengan penerapan dynamic governance.

Dengan adanya penerapan Dynamic Governance, dapat dilakukan pendekatan pengelolaan yang fleksibel dan adaptif dalam penentuan tarif LRT Jabodebek:

### **1. Pemantauan Secara *Real-Time***

Menggunakan teknologi informasi untuk memantau kondisi operasional secara real-time, seperti jumlah penumpang, waktu puncak, dan status infrastruktur transportasi. Dengan memanfaatkan data real-time, pemerintah dan operator dapat mengidentifikasi fluktuasi dalam permintaan transportasi dan menyesuaikan tarif dengan cepat. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian tarif berbasis jarak atau waktu untuk mencerminkan kondisi terkini. Misalnya, tarif dapat dinaikkan saat jam sibuk atau saat terjadi lonjakan penumpang, dan diturunkan pada waktu non-puncak untuk menarik lebih banyak penumpang.

### **2. Kebijakan Tarif Bertahap**

Menerapkan sistem tarif bertahap yang memungkinkan perubahan tarif berdasarkan kategori tertentu, seperti waktu (tarif puncak vs non-puncak). Kebijakan tarif bertahap memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan tarif. Misalnya, tarif puncak bisa lebih tinggi dibandingkan tarif non-puncak untuk mendorong distribusi penumpang yang lebih merata sepanjang hari. Demikian juga, tarif berdasarkan zona memungkinkan tarif yang lebih adil bagi penumpang yang bepergian lebih jauh, tanpa memberatkan penumpang dengan jarak tempuh pendek. Pemerintah dan operator bisa mengatur tarif puncak dan non-puncak secara dinamis, menyesuaikan dengan pola perjalanan penumpang, kebutuhan operasional, dan kapasitas LRT pada setiap waktu tertentu (Yu et al., 2018).

### **3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (operator, pemerintah, pengguna, masyarakat) dalam proses penentuan tarif akan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan transparan. Forum atau survei yang melibatkan pengguna LRT Jabodebek dapat mengidentifikasi tarif yang dirasa wajar dan diterima publik. Pemerintah dapat mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat, baik melalui media sosial, forum komunitas, atau survei online, untuk mengumpulkan masukan terkait tingkat tarif yang dianggap adil dan sesuai dengan daya beli Masyarakat (S. Wang et al., 2018).

### **4. Evaluasi Berkala**

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif secara berkala untuk memastikan bahwa tarif yang diterapkan masih relevan dengan perubahan dalam pola permintaan, kondisi sosial-ekonomi, dan operasional LRT Jabodebek. Evaluasi yang dilakukan secara rutin membantu memastikan bahwa tarif yang diterapkan tetap mencerminkan realitas lapangan, baik dari sisi operator yang perlu menutupi biaya operasional, maupun dari sisi masyarakat yang membutuhkan tarif yang terjangkau.

### **5. Penentuan Tarif Berbasis Keadilan Sosial dan Aksesibilitas**

Menyesuaikan tarif dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan aksesibilitas, di mana tarif harus dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat dan mempertimbangkan kesejahteraan penumpang. Penerapan tarif yang adil dan aksesibel akan memastikan bahwa LRT Jabodebek dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok yang lebih rentan, seperti pelajar, mahasiswa, atau pekerja dengan penghasilan rendah. Selain itu, penerapan tarif berbasis jarak dapat meningkatkan perasaan keadilan di kalangan pengguna (Ling et al., 2019).

Sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada sistem tarif tetap atau studi kasus negara maju tanpa memperhitungkan konteks daya beli masyarakat negara

berkembang seperti Indonesia. Kurangnya penelitian tentang dampak real-time data dalam pengelolaan tarif transportasi berbasis dynamic governance. Penelitian ini mengisi celah dengan fokus pada sistem tarif berbasis jarak pada transportasi publik baru di Indonesia, khususnya pada konteks ekonomi dan sosial Jabodebek.

### **Implikasi Penelitian**

1. Kebijakan Publik: Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang kebijakan subsidi yang lebih efisien, berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
2. Pengelolaan Transportasi: Operator LRT, seperti PT KAI, dapat mengadopsi *Dynamic Governance* untuk menyesuaikan tarif secara lebih adaptif berdasarkan data penumpang dan kondisi ekonomi.
3. Peningkatan Aksesibilitas: Dengan memastikan tarif yang terjangkau, layanan transportasi umum seperti LRT Jabodebek dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Peningkatan jumlah pengguna LRT dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan.

### **KESIMPULAN**

Masalah transportasi di wilayah Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) memang menjadi tantangan besar yang harus diatasi, mengingat permasalahan kemacetan yang parah, meningkatnya volume kendaraan, serta kualitas infrastruktur transportasi yang belum memadai. Hal ini diperparah dengan perilaku masyarakat yang masih cenderung mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi, meskipun transportasi umum dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas. Pemerintah telah mengidentifikasi berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan pembangunan LRT Jabodebek, yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk masalah transportasi yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk memahami minat masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodebek serta mengevaluasi efisiensi perhitungan subsidi tarif berdasarkan jarak. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih tertarik pada skema tarif berdasarkan jarak dibandingkan dengan sistem tarif tunggal, sehingga LRT Jabodebek dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan atau mengembangkan sistem tarif berbasis jarak untuk lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi penumpang dengan penerapan dynamic governance, dimana kebijakan dan keputusan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi yang berkembang. Penentuan tarif berbasis jarak yang dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi social - ekonomi, permintaan, dan infrastruktur. Tarif yang tepat, yang mempertimbangkan faktor kesetaraan sosial, aksesibilitas, dan kebutuhan operasional, diharapkan dapat mengatasi tantangan terkait tingginya biaya operasional dan keterjangkauan bagi masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anciaes, P., Metcalfe, P., Heywood, C., & Sheldon, R. (2019). The Impact Of Fare Complexity On Rail Demand. *Transportation Research Part A: Policy And Practice*, 120, 224–238. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.12.020>
- Anggitia, N., Suherdiana, D., & Paryati, P. (2022). Manajemen Public Relations Melalui Media Internal “Milis Broadcast “dalam Menjali Hubungan Harmonis dengan Karyawan Kantor Pusat PT. KAI (Persero). *Reputation: Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, 7(1), 39–60. <https://doi.org/10.15575/reputation.v7i1.29779>
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., Kusnadi, I. H., Madubun, H., Hidayati, S., & Anita, D. (2024). *Membangun Desa Dengan Revolusi Digital*. Mega Press Nusantara.
- Banerjee, N., Morton, A., & Akartunali, K. (2020). Passenger Demand Forecasting In Scheduled Transportation. *European Journal of Operational Research*, 286(3), 797–810. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.10.032>
- Batarce, M., & Galilea, P. (2018). Cost and Fare Estimation for The Bus Transit System of Santiago. *Transport Policy*, 64, 92–101. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.01.002>
- Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Dutta, T., & Mandal, M. K. (2018). *Neuromarketing In India: Understanding The Indian Consumer*. Routledge.
- Gemilar, A. (2019). Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Studi Kasus Pada Taksi Online di Kota Yogyakarta). *Dinamika Hukum*, 10(3).
- Huang, D., Liu, Z., Liu, P., & Chen, J. (2016). Optimal Transit Fare And Service Frequency Of A Nonlinear Origin-Destination Based Fare Structure. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 96, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.10.004>
- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Ida Restari, D. (2022). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung*.
- Jakarta, B. (2019). *Pendapatan Per Kapita Provinsi DKI Jakarta (Sebuah Hasil Studi)*. Pendapatan Per Kapita Provinsi DKI Jakarta (Sebuah Hasil Studi)-Unit
- Ling, S., Jia, N., Ma, S., Lan, Y., & Hu, W. (2019). An Incentive Mechanism Design for Bus Subsidy Based on The Route Service Level. *Transportation Research Part A: Policy And Practice*, 119, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.11.006>
- Perhubungan, K. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Km 59 Tahun 2010*. Google.
- Purwantoro, S. A. (2023). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Menyongsong Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group.
- Rahayu, S. A. (2020). *Analisis Turn Around PT Kereta Api Indonesia sebagai Respons terhadap Tantangan Bisnis Digital*.
- Rubensson, I., Susilo, Y., & Cats, O. (2020). Is Flat Fare Fair? Equity Impact Of Fare

- Scheme Change. *Transport Policy*, 91, 48–58.
- Sianipar, A. (2019). Kajian Preferensi Masyarakat dalam Menggunakan LRT Jabodebek. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 21(1), 13–20. <https://doi.org/10.25104/jptd.v21i1.962>
- Socorro, M. P., & Betancor, O. (2020). Air Transport Subsidies for Resident Passengers: The Unexpected Effects On Competition. *Research In Transportation Economics*, 79, 100772. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2019.100772>
- Song, S., Sun, Q., Wang, Z., & Zou, X. (2019). Commuting Subsidy and Burden: Evidence from Tianjin, China. *Case Studies on Transport Policy*, 7(3), 574–582.
- Suprpto, F. N. (2021). *Efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Melaksanakan Program MRT (Mass Rapid Transit) untuk Mengatasi Kemacetan di Kota Jakarta*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Susanti, P. D., & Sabardila, A. (2023). Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Akibat Bendungan Jlantah di Desa Tlobo dan Karang Sari. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 5(1), 57–71. <https://doi.org/10.20527/jpp.v5i1.7491>
- Wang, Q., & Deng, L. (2019). Integrated Optimization Method of Operational Subsidy With Fare for Urban Rail Transit. *Computers & Industrial Engineering*, 127, 1153–1163. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.05.003>
- Wang, S., & Qu, X. (2017). Station Choice for Australian Commuter Rail Lines: Equilibrium and Optimal Fare Design. *European Journal of Operational Research*, 258(1), 144–154. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.040>
- Wang, S., Zhang, W., & Qu, X. (2018). Trial-And-Error Train Fare Design Scheme for Addressing Boarding/Alighting Congestion at CBD Stations. *Transportation Research Part B: Methodological*, 118, 318–335. <https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.11.003>
- Widodo, J. (2018). *Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla*. Jakarta.
- Yu, M.-M., Chen, L.-H., & Hsiao, B. (2018). A Performance-Based Subsidy Allocation Of Ferry Transportation: A Data Envelopment Approach. *Transport Policy*, 68, 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.04.004>



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

---